

FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI
KELURAHAN TLOGOMAS,
KECAMATAN LOWOKWARU,
KOTA MALANG

Submission date: 16-Apr-2021 02:55AM (UTC)
by Augusto Da Costa Gomes

Submission ID: 1520763335

File name: Bebas_Plagiasi_-_Jhon_Jho.docx (38.9K)

Word count: 1297

Character count: 7879

2
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KELURAHAN TLOGOMAS, KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA
MALANG**

SKRIPSI



OLEH :
Agusto Da Costa Gomes
2015110003

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
MALANG
2021**

1 **ABSTRACT**

Land and Building Tax (PBB) is a tax that is material in nature, so in this case the Land and Building Tax has a weakness, namely it does not pay attention to aspects of the economic capacity of the Taxpayer. In the practice of tax imposition, taxpayers often consider it unfair. This research uses quantitative research, the location of this research is located in Tlogomas Village, Malang, East Java, Indonesia. The data source in this study uses primary data and secondary data, namely 35 residents of Tlogomas Malang village, the method of analysis used in this study uses multiple linear regression analysis methods. The results of the research prove that the Taxpayer Awareness Variable has an effect on Taxpayer Compliance, thus that taxpayer awareness is the main key in implementing Taxpayer Compliance in Tlogomas Village, Lowokwaru District, Malang City. Moral Obligation Variable has no effect on Taxpayer Compliance, This explains that Moral Obligation is a point of view that can be denied by the people of Tlogomas Village, Lowokwaru District, Malang City in carrying out their tax obligations. Tax Service Quality Variable has no effect on Taxpayer Compliance, service quality is not a measure in implementing compliance for the community in Tlogomas Village, Lowokwaru District, Malang City. The variable of Tax Tax Sanctions has an effect on Taxpayer Compliance. Tax sanctions are one of the references for the community in Tlogomas Village, Lowokwaru District, Malang City.

Keywords : *Land and Building Tax, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN**1.1.Latar Belakang**

Sebagaimana salah satu negara yang akan berkembang, salah satu negara Indonesia yang mana telah mengalahkan infrastruktur di semua unsur, diantaranya hukum, sosial serta ekonomi. Dalam perpajakan dapat dikatakan sebagai salah satu unsur untuk dapat memaksimalkan sebuah pendapatan suatu negara yang sangat meningkat yang bertujuan untuk melakukan untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di negara ini yang mana telah dituangkan dalam UU alinea 4 Tahun 1945. Disamping itu juga pajak juga dapat dikatakan sebagai salah satu unsur yang sangat terpenting yang mana unsur anggaran bagi pihak pemerintahan yang mana bertujuan untuk dapat memfasilitasi semua unsur pengeluaran, bahkan pajak juga dapat dikatakan sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam ruang lingkup ekonomi. “pajak memiliki sebuah fungsi untuk dapat memberikan sebuah gambaran terhadap pentingnya pajak dalam menjamin kehidupan yang berkelanjutan pada sebuah negara yang mana akan dapat mendongkrak sistem perekonomian, oleh karena itu sebuah pendapatan negara seharusnya dapat memaksimalkan berdasarkan dengan periode yang ada. Tingkat pendapatan pada sebuah negara dapat dilakukan dengan salah cara ialah dilakukan peningkatan pada sebuah sektor perpajakan. Untuk dapat melakukan peningkatan pada sebuah pajak seharusnya diperhatikan ialah terkait dengan sebuah kesadaran pada kalangan masyarakat yang mana memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan dengan PP pemerintah yang telah diputuskan”.

Kota Malang memiliki pajak diantaranya PBB, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, pajak reklame/iklan, pajak hiburan serta pajak restoran. Oleh karena itu selalu ditekankan dalam memaksimalkan perpajakan ialah tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta disusuli dengan tingkat kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak, karena dengan cara inilah secara tidak langsung akan dapat memaksimalkan pendapatan negara Indonesia dalam hal ini di sektor perpajakan. PBB merupakan salah satu pajak yang dapat memberikan sebuah pengaruh yang sangat signifikan kepada negara Indonesia yang mana telah dicatat pada MENDAGRI Tahun 2010 No 58 dan Tahun 2013/Pmk 07 yang mana berbicara terkait dengan persiapan penghasilan PBB atau sering dikenal dengan nama pajak bumi dan bangunan.

Pada dasarnya pajak daerah dipungut oleh masing-masing daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Adapun dana yang berlebih tentu akan masuk ke pusat namun jika pemerintah daerah menganalisis kebutuhan daerahnya dengan tepat dan memang memiliki dana lebih dari anggaran daerahnya. Sumber dari dana pendapatan daerah harus dicari dan telusuri secara mendalam agar pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dapat terpecahkan dengan baik. Dengan mendapatkan data yang benar maka segala tantangan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dapat disusun dengan terencana dan pendapatan asli daerah ini dapat dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah dengan baik. Tentu hal ini sesuai dengan kebijakan-kebijakan masing-masing kepala daerah.

PBB atau sering dikenal dengan nama ⁴ pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan salah satu sifat pajak yang berbentuk benda, oleh sebab itu PP memiliki sebuah kelemahan ialah minimnya untuk memperhatikan sistem aspek ekonomi WP (wajib pajak) berdasarkan dengan sebuah praktikum pengenalan pada pajak, pada umumnya dinilai sama sekali kurang transparansi oleh WP. Sering ditemui salah satu objek pajak pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis yang meningkat akan tetapi dimiliki serta adab dimanfaatkan oleh WP (wajib pajak) yang mempunyai keahlian dalam membayar pajak itu dapat dikatakan masih minim. Kesenjangan bisa saja terjadi sebagai salah satu ialah berasal dari pihak bendahara PBB menyikapi terhadap aturan yang mengatur terkait dengan pengurangan PBB. Terhadap WP mempunyai keahlian yang ekonomis yang masih minim oleh karena itu dilakukan untuk penuntutan hak atas WP dengan cara mengadakan sebuah permohonan atas pengurangan atas meningkatnya pajak yang terutang.

Kota Malang dapat melakukan pengurangan terhadap PBB atas penetapannya dapat dikatakan hak atas WP yang mana akan diatur oleh PW atau peraturan walikota Malang Tahun 2011 No 11 terkait dengan memperbaiki, terjadinya pengurangan serta penghapusan atas sanksi administrasi PBB terhadap perkotaan, serta masih banyak lagi WP yang mana sama sekali belum mengerti proses pembayaran PBB yang mana akan mengalami lajunya pertumbuhan pada ekonomi ¹² Kota Malang.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Tlogomas yaitu peneliti melihat minimnya Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Tlogomas, dengan adanya penelitian ini diharapkan ⁵ kesadaran Wajib Pajak semakin meningkat.

Seperti apa yang telah diungkap pada latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan riset ini dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang”

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup riset ini dilakukan sehingga dapat dikatakan risit ini lebih berfokus berdasarkan objek penelitian. Oleh sebab itu dalam riset ini peneliti lebih berpatokan pada pemahaman WP dapat memberikan pengaruh atas pembayaran PBB serta faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh atas membayar PBB di Kelurahan Tlogomas Kota Malang.

1.3. Rumusan Masalah

Seperti apa yang telah diungkap pada ruang lingkup pada riset ini, sehingga rumusan masalah yang akan diambil ialah :

1. Apakah kesadaran WP dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Kota Malang ?
2. Apakah kewajiban moral dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Kota Malang ?
3. Apakah kualitas pelayanan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Kota Malang ?
4. Apakah sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Kota Malang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Seperti apa yang telah diungkap pada rumusan masalah dalam riset ini, sehingga tujuan penelitian yang akan diambil ialah :

5. Untuk mengetahui kesadaran WP dapat ¹berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Kota Malang
6. Untuk mengetahui ²kewajiban moral dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Kota Malang
7. Untuk mengetahui kualitas pelayanan dapat ¹berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Kota Malang
8. Untuk mengetahui sanksi pajak dapat ¹berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Kota Malang

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil riset ini dapat mendorong serta dapat memberikan ilmu pengetahuan serta referensi penelitian terhadap persepsi pemilik bangunan (kamar kos) atas PP Kota Malang Tahun 2010 No 16 atas pajak daerah diwaktu yang akan datang

2. Bagi Lembaga Universitas

3. Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat membangun, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi

4. Bagi Pihak Lain

Riset ini akan selalu diharapkan untuk menambahkan atas hasil riset serta diharapkan sebagai salah satu bahan referensi untuk riset-riset yang akan datang untuk dapat melakukan riset yang sama pula.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN TLOGOMAS, KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	5%
2	docobook.com Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	Nedi Hendri. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA UMKM DI KOTA METRO", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2016 Publication	1%
6	download.atlantis-press.com Internet Source	1%
7	issuu.com Internet Source	1%

8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
9	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
10	Dhalifah Nur Rohmah. "Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang", Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 2018 Publication	1 %
11	Raymond R. Korengkeng, Herman Karamoy, Winston Pontoh. "ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	1 %
12	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
14	qdoc.tips Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On